



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Novie Andri Setianto
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 428973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **955.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/135 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
2. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 1.434 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **325.000.000**

1. MOBIL, Toyota Innova Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, UNITED MX1200 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **192.700.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	413.858.662
F. HARTA LAINNYA	Rp.	122.915.162
Sub Total	Rp.	2.009.473.824
III. HUTANG	Rp.	288.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.721.473.824

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.